



**SALINAN**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 465);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
dan  
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 1.337.832.404.000,00 bertambah sejumlah Rp. 52.087.866.000,00 sehingga menjadi Rp.1.389.920.270.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp	1.289.644.404.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	15.313.646.000,00
Jumlah Pendapatan		
Setelah Perubahan	Rp	1.304.958.050.000,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp	1.327.520.846.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	51.327.866.000,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	1.378.848.712.000,00
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1). Semula	Rp	48.188.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	87.434.448.000,00
Jumlah penerimaan Pembiayaan		
Setelah Perubahan :	Rp	135.622.448.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1). Semula	Rp	10.311.558.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	760.000.000,00
Jumlah pengeluaran Pembiayaan		
Setelah Perubahan :	Rp	11.071.558.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto		
setelah perubahan :	Rp	124.550.890.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
tahun Berkenaan : Rp 124.550.890.000,00

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula Rp 185.457.434.000,00  
2). Bertambah/(berkurang) Rp 14.169.707.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah  
Setelah Perubahan Rp 199.627.141.000,00

b. Dana Perimbangan

1). Semula Rp 898.156.928.000,00  
2). Bertambah/(berkurang) Rp (2.654.261.000,00)

Jumlah Dana Perimbangan  
Setelah Perubahan Rp 895.502.667.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1). Semula Rp 206.030.042.000,00  
2). Bertambah/(berkurang) Rp 3.798.200.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah  
Setelah Perubahan Rp 209.828.242.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula Rp 57.180.000.000,00  
2). Bertambah/(berkurang) Rp 13.000.000.000,00

Jumlah Pajak daerah  
Setelah Perubahan Rp 70.180.000.000,00

b. Retribusi Daerah sejumlah

1). Semula Rp 18.452.318.000,00  
2). Bertambah/(berkurang) Rp (513.502.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah  
Setelah Perubahan : Rp 17.938.816.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1). Semula Rp 9.309.174.000,00  
2). Bertambah/(berkurang) Rp 185.826.000,00

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah -  
yang dipisahkan  
Setelah Perubahan Rp 9.495.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1). Semula Rp 100.515.942.000,00  
2). Bertambah/(berkurang) Rp 1.497.383.000,00

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang -  
sah Setelah Perubahan Rp 102.013.325.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak		
1). Semula	Rp	68.981.515.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	736.813.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak		
Setelah Perubahan	Rp	69.718.328.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1). Semula	Rp	652.906.913.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Dana Alokasi Umum		
Setelah Perubahan	Rp	652.906.913.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1). Semula	Rp	176.268.500.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(3.391.074.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus		
Setelah Perubahan	Rp	172.877.426.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1). Semula	Rp	38.179.800.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	633.200.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah		
Setelah Perubahan	Rp	38.813.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp	70.725.351.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	3.000.000.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
Setelah Perubahan	Rp	73.725.351.000,00
c. Dana Penyesuaian		
1). Semula	Rp	83.595.758.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Dana Penyesuaian		
Setelah Perubahan	Rp	83.595.758.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp	-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	150.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
Setelah Perubahan	Rp	150.000.000,00

e. Sumbangan Pihak Ketiga	Rp	13.529.133.000,00
Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga	Rp	15.000.000,00
Setelah Perubahan	Rp	13.544.133.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
    - 1). Semula Rp 630.151.041.000,00
    - 2). Bertambah/(berkurang) Rp (10.438.909.000,00)
    - Jumlah Belanja Tidak Langsung
    - Setelah Perubahan Rp 619.712.132.000,00
  - b. Belanja Langsung
    - 1). Semula Rp 697.369.805.000,00
    - 2). Bertambah/(berkurang) Rp 61.766.775.000,00
    - Jumlah Belanja Langsung
    - Setelah Perubahan Rp 759.136.580.000,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
    - 1). Semula Rp 470.584.816.200,00
    - 2). Bertambah/(berkurang) Rp (15.114.724.801,00)
    - Jumlah Belanja pegawai -
    - Setelah Perubahan Rp 455.470.091.399,00
  - b. Belanja Hibah
    - 1). Semula Rp 7.898.680.000,00
    - 2). Bertambah/(berkurang) Rp 1.028.200.000,00
    - Jumlah Belanja Hibah -
    - Setelah Perubahan Rp 8.926.880.000,00
  - c. Belanja Bantuan Sosial
    - 1). Semula Rp 2.448.000.000,00
    - 2). Bertambah/(berkurang) Rp -
    - Jumlah Belanja Bantuan Sosial -
    - Setelah Perubahan Rp 2.448.000.000,00
  - d. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada - Pemerintah Desa
    - 1). Semula Rp 7.563.231.800,00
    - 2). Bertambah/(berkurang) Rp 2.621.502.800,00
    - Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada -
    - Pemerintah Desa -
    - Setelah Perubahan Rp 10.184.734.600,00
  - e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik
    - 1). Semula Rp 139.156.313.000,00
    - 2). Bertambah/(berkurang) Rp 2.704.667.001,00



Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik		
Setelah Perubahan	Rp	141.860.980.001,00
f. Belanja Tidak terduga		
1). Semula	Rp	2.500.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.678.554.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga -		
Setelah Perubahan	Rp	821.446.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai		
1). Semula	Rp	123.534.865.894,80
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(4.326.284.673,00)</u>
Jumlah Belanja pegawai -		
Setelah Perubahan	Rp	119.208.581.221,80
b. Belanja Barang dan Jasa		
1). Semula	Rp	261.239.352.188,20
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>27.212.807.565,01</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa -		
Setelah Perubahan	Rp	288.452.159.753,21
c. Belanja Modal		
1). Semula	Rp	312.595.586.917,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>38.880.252.107,99</u>
Jumlah Belanja Modal -		
Setelah Perubahan	Rp	351.475.839.024,99

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1). Semula	Rp	48.188.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>87.434.448.000,00</u>
Jumlah Penerimaan		
Setelah Perubahan	Rp	135.622.448.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1). Semula	Rp	10.311.558.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	760.000.000,00
Jumlah Pengeluaran		
Setelah Perubahan	Rp	11.071.558.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :		
a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
1). Semula	Rp	28.188.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>87.434.448.000,00</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya		

setelah perubahan	Rp	115.622.448.000,00
-------------------	----	--------------------

b. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

1). Semula	Rp	20.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
setelah perubahan	Rp	20.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Sejumlah :

1). Semula	Rp	10.311.558.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp	760.000.000,00
Jumlah penyertaan modal (Investasi) -		
setelah perubahan	Rp	11.071.558.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2018;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset tetap daerah

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lain-lain
11. Lampiran XI Daftar kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

#### Pasal 6

Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagaiberikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 6 mencakup :
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat.
  - b. Program dan kegiatan dalam rangka mengatasi dampak dari suatu kebijakan pemerintah dan atau krisis keuangan, ekonomi, dan energi yang dapat menyebabkan turunnya derajat kemakmuran masyarakat.
  - c. Keadaan mendesak yang diakibatkan oleh bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir dan lain-lain.
  - d. Keadaan mendesak yang diakibatkan oleh krisis sosial, seperti konflik sosial, kerusuhan dan lain-lain.
  - e. Keadaan mendesak yang diakibatkan oleh ulah/perbuatan manusia, seperti musibah kebakaran, musibah transportasi (laut, udara dan darat) dan lain-lain.

#### Pasal 8

Penjabaran lebih lanjut mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 9

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal, 17 Oktober 2018

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

TTD

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 17 Oktober 2018

**PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

TTD

**SUYANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 12  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 12, 95/2018

*Salinan sesuai dengan aslinya*  
**Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M**  
**NIP. 19690112 199903 2 005**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

I UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 serta kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Nomor 900/863/II/BPKAD/2018 dan Nomor 13/DPRD/2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 Nomor 900/864/II/BPKAD/2018 dan Nomor 14/DPRD/2018.

Dasar dilakukannya Perubahan APBD adalah :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Penganggaran kegiatan mendesak.

APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 81

***Lampiran I***

**PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PERUBAHAN APBD TA. 2018**

# Ringkasan APBD

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR 12 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

1.1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.289.644.404.000,00</b>	<b>1.304.958.050.000,00</b>	<b>15.313.646.000,00</b>	<b>1,18</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>185.457.434.000,00</b>	<b>199.627.141.000,00</b>	<b>14.169.707.000,00</b>	<b>7,64</b>
4.1.1	Pajak Daerah	57.180.000.000,00	70.180.000.000,00	13.000.000.000,00	22,73
4.1.2	Retribusi Daerah	18.452.318.000,00	17.938.816.000,00	(513.502.000,00)	2,78
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.309.174.000,00	9.495.000.000,00	185.826.000,00	1,99
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.515.942.000,00	102.013.325.000,00	1.497.383.000,00	1,48
<b>4.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>898.156.928.000,00</b>	<b>895.502.667.000,00</b>	<b>(2.654.261.000,00)</b>	<b>0,29</b>
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	68.981.515.000,00	69.718.328.000,00	736.813.000,00	1,06
4.2.2	Dana Alokasi Umum	652.906.913.000,00	652.906.913.000,00	0,00	0,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	176.268.500.000,00	172.877.426.000,00	(3.391.074.000,00)	1,92
<b>4.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>206.030.042.000,00</b>	<b>209.828.242.000,00</b>	<b>3.798.200.000,00</b>	<b>1,84</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	38.179.800.000,00	38.813.000.000,00	633.200.000,00	1,65
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	70.725.351.000,00	73.725.351.000,00	3.000.000.000,00	4,24
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	83.595.758.000,00	83.595.758.000,00	0,00	0,00
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
4.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	13.529.133.000,00	13.544.133.000,00	15.000.000,00	0,11
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.289.644.404.000,00</b>	<b>1.304.958.050.000,00</b>	<b>15.313.646.000,00</b>	<b>1,18</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.327.520.846.000,00</b>	<b>1.378.848.712.000,00</b>	<b>51.327.866.000,00</b>	<b>3,86</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>630.151.041.000,00</b>	<b>619.712.132.000,00</b>	<b>(10.438.909.000,00)</b>	<b>1,65</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	470.584.816.200,00	455.470.091.399,00	(15.114.724.801,00)	3,21
5.1.4	Belanja Hibah	7.898.680.000,00	8.926.880.000,00	1.028.200.000,00	13,01
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.448.000.000,00	2.448.000.000,00	0,00	0,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.563.231.800,00	10.184.734.600,00	2.621.502.800,00	34,66
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan	139.156.313.000,00	141.860.980.001,00	2.704.667.001,00	1,94



	Partai Politik				
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	821.446.000,00	(1.678.554.000,00)	67,14
<b>5.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>697.369.805.000,00</b>	<b>759.136.580.000,00</b>	<b>61.766.775.000,00</b>	<b>8,85</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	123.534.865.894,80	119.208.581.221,80	(4.326.284.673,00)	3,50
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	261.239.352.188,20	288.452.159.753,21	27.212.807.565,01	10,41
5.2.3	Belanja Modal	312.595.586.917,00	351.475.839.024,99	38.880.252.107,99	12,43
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>1.327.520.846.000,00</b>	<b>1.378.848.712.000,00</b>	<b>51.327.866.000,00</b>	<b>3,86</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(37.876.442.000,00)</b>	<b>(73.890.662.000,00)</b>	<b>(36.014.220.000,00)</b>	<b>95,08</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>37.876.442.000,00</b>	<b>124.550.890.000,00</b>	<b>86.674.448.000,00</b>	<b>228,83</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah N</b>	<b>48.188.000.000,00</b>	<b>135.622.448.000,00</b>	<b>87.434.448.000,00</b>	<b>181,44</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	28.188.000.000,00	115.622.448.000,00	87.434.448.000,00	310,18
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>10.311.558.000,00</b>	<b>11.071.558.000,00</b>	<b>760.000.000,00</b>	<b>7,37</b>
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.311.558.000,00	11.071.558.000,00	760.000.000,00	7,37
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>37.876.442.000,00</b>	<b>124.550.890.000,00</b>	<b>86.674.448.000,00</b>	<b>228,83</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.660.228.000,00</b>	<b>50.660.228.000,00</b>	<b>100,00</b>

Bupati Kotawaringin Barat

TTD

NURHIDAYAH

-